

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan juga terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17 ribu pulau lebih (Anjani, 2021). Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia yang strategis tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang sering dilalui oleh pelayaran internasional yang vital bagi perdagangan dunia terutama di beberapa perairan seperti Selat Malaka dan Laut Sulawesi (Kristina, 2021). Oleh karena itu, Indonesia perlu menguatkan posisinya sebagai negara maritim dalam rangka melindungi sumber daya alam serta menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, Indonesia perlu memanfaatkan berbagai macam instrumen atau pola kebijakan luar negeri. Salah satu instrumen atau pola kebijakan luar negeri yang dapat Indonesia lakukan adalah melalui diplomasi.

Dalam dunia hubungan internasional ada istilah diplomasi. Diplomasi menurut Noe Carnago adalah pelaksanaan hubungan internasional melalui negosiasi dan dialog, atau dengan cara-cara lain, dengan tujuan untuk memajukan hubungan damai di antara negara-negara (Cornago, 2022). Diplomasi juga bisa diartikan sebagai cara suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain untuk mencapai kepentingan bersama tanpa adanya kekerasan (Khairally, 2023). Diplomasi memiliki berbagai macam bentuk, salah satu bentuknya adalah diplomasi militer. Diplomasi militer merupakan penggunaan kekuatan militer tanpa kekerasan untuk

memberi pengaruh kepada negara lain dan mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara (DEREK PING, 2024). Diplomasi militer kerap digunakan beberapa negara dengan tujuan membangun kepercayaan, meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat kerjasama antarnegara dalam menghadapi ancaman bersama. Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Angkatan Laut (AL) merupakan salah satu instrumen negara yang tidak hanya menjalankan tugas untuk bertempur, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung diplomasi militer Indonesia.

TNI Angkatan Laut merupakan salah satu instrumen utama pertahanan negara yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan diplomasi militer, khususnya di ranah maritim. Dalam Undang-Undang (UU) nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2), tugas pokok TNI ada dua yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (PUSPEN, 2007). Dalam tugas pokok TNI operasi militer selain perang, terdapat poin yang menyatakan “melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri”. Poin tersebut menegaskan bahwa diplomasi militer merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh TNI. Dalam pelaksanaannya, TNI Angkatan Laut telah aktif menjalankan diplomasi militer melalui berbagai macam kegiatan seperti kunjungan kapal perang ke negara sahabat, latihan gabungan bilateral dan multilateral, misi kemanusiaan maritim, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat operasional TNI Angkatan Laut, tetapi juga membangun hubungan pertahanan yang erat dengan negara-negara lain. TNI Angkatan Laut juga memiliki peran pokok dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui diplomasi militer.

Salah satu bentuk diplomasi militer yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut adalah Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK). Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) merupakan latihan bersama Angkatan Laut berskala dunia yang diadakan di Indonesia secara berkala (Isnaini et al., 2023). Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) merupakan upaya konkret Indonesia untuk memperkuat diplomasi maritim dan peran TNI Angkatan Laut dalam konteks hubungan internasional (Muhammad Rezky Hafidzzur Rahim & Agussalim Burhanuddin, 2023). MNEK menjadi sebuah wadah yang baik untuk membangun hubungan antarnegara yang penting, dengan fokus meningkatkan kerjasama antar Angkatan Laut dari berbagai negara dalam menghadapi tantangan bersama terlebih tantangan non-tradisional. Salah satu tujuan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) adalah untuk meningkatkan kerjasama bilateral, multilateral, dan interoperabilitas angkatan laut di area Indo-Pasifik dan di seluruh dunia, khususnya kerja sama dalam menangani adanya bencana alam, peningkatan kerja sama maritim, dan dialog antar intelijen (Isnaini et al., 2023).

Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan sudah dilaksanakan sebanyak lima kali dari tahun 2014 hingga 2025. Pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) dari tahun ke tahun menunjukkan dinamika yang kompleks dan strategis. Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) terakhir dilaksanakan di Bali pada Februari 2025 dengan tema “Maritime Partnership for Peace and Stability” (Achmad, 2025). Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 berbeda dengan MNEK sebelumnya karena berlangsung di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global khususnya di kawasan

Indo-Pasifik. Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 diikuti oleh 38 negara dengan latar belakang hubungan antarnegara yang berbeda-beda, Filipina dan Vietnam yang tengah mengalami ketegangan dengan Cina hadir sebagai bentuk sikap tegas terhadap tekanan di Laut Cina Selatan. Amerika, Cina dan Rusia hadir bersamaan dalam MNEK 2025 dengan tujuan strategis, mereka saling beradu menunjukkan kekuatan militer agar dapat mempengaruhi negara-negara lain bukan hanya sekedar ikut latihan seperti di MNEK sebelumnya. Kehadiran berbagai negara dengan kepentingan berbeda dalam satu forum yaitu Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 mencerminkan keberhasilan Indonesia dalam memainkan peran sebagai negara netral dan membangun kepercayaan antarnegara melalui diplomasi militer.

Implementasi diplomasi militer TNI Angkatan Laut dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 mencerminkan beberapa tujuan strategis diplomasi militer seperti yang disebut oleh Muthanna 2011, yaitu dialog politik, keamanan, dan pertahanan strategis; pertukaran persepsi; kontak personel profesional; melaksanakan keterlibatan militer internasional; mempromosikan interoperabilitas pertahanan dan militer; partisipasi dalam misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan; dan transparansi kebijakan militer nasional. Melalui latihan gabungan antar angkatan laut global, dialog strategis, serta kegiatan kemanusiaan dan budaya, TNI Angkatan Laut menunjukkan bahwa kekuatan militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai instrumen diplomatik negara untuk menjaga stabilitas kawasan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji

lebih lanjut bagaimana TNI Angkatan Laut mengimplementasikan diplomasi militer dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama yaitu tulisan berjudul “Multilateral Naval Exercise Komodo: Enhancing Indonesia’s Multilateral Defence Diplomacy?” oleh Frega Wenas Inkiriwang tahun 2021. Tulisan tersebut berisi analisis bagaimana Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) dikembangkan sejak 2014 dan mengkaji peran Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) sebagai alat diplomasi pertahanan multilateral Indonesia dengan jangkauan penelitian tahun 2014-2018. Yang kedua yaitu tulisan berjudul “Giat Multilateral Naval Exercise Komodo dalam Menjaga Stabilitas Perdamaian di Kawasan Regional Sekaligus Bukti Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” oleh M. Arif Isnaini, Hari Sulisty, Rina Marlina tahun 2023. Tulisan tersebut berisi peran Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) sebagai sarana menjaga stabilitas regional dan bukti nyata bahwa Indonesia menjalankan visi poros maritim dunia dengan jangkauan penelitian tahun 2023. Yang ketiga yaitu tulisan berjudul “Dampak Pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo terhadap Diplomasi Maritim Indonesia” oleh Muhammad Rezky Hafidzzur Rahim dan Agussalim Burhanuddin tahun 2024. Tulisan tersebut mengkaji dampak pelaksanaan MNEK dari 2014-2023 terhadap diplomasi maritim Indonesia dan fokus pada hasil dan pengaruh MNEK terhadap citra dan hubungan internasional Indonesia.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, terdapat perbedaan yaitu belum adanya penelitian terkait Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) tahun 2025 dan

pengimplementasian diplomasi militer dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK). Dengan ini, penulis menggunakan teori diplomasi militer oleh Muthanna untuk menganalisis implementasi diplomasi militer TNI AL dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ditemukan rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu, **“Bagaimana implementasi diplomasi militer TNI Angkatan Laut dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dan akademisi dalam bentuk penelitian ilmiah. Serta sebagai tugas akhir untuk melengkapi syarat utama dalam proses memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi diplomasi militer TNI Angkatan Laut (AL) dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025, menjelaskan peran TNI Angkatan

Laut (AL) dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 dan mengidentifikasi manfaat strategis bagi keamanan maritim. Serta mengkaji persepsi negara peserta terhadap kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kerja sama maritim multilateral.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Diplomasi Militer

Diplomasi militer merupakan penggunaan kekuatan militer tanpa kekerasan untuk memberi pengaruh kepada negara lain dan mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara (DEREK PING, 2024). Diplomasi militer kerap digunakan beberapa negara dengan tujuan membangun kepercayaan, meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat kerjasama antarnegara dalam menghadapi ancaman bersama. Menurut Muthanna (2011) diplomasi militer merupakan penggunaan angkatan bersenjata dalam operasi selain perang yang dibangun atas dasar disiplin, keahlian, dan profesionalisme militer untuk mencapai tujuan nasional dan luar negeri (Muthanna, 2011). Diplomasi ini harus berjalan selaras dan terintegasi dengan diplomasi nasional secara keseluruhan. Lebih lanjut, Muthanna menjelaskan bahwa dalam diplomasi militer terdapat beberapa hal strategis yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Dialog politik, keamanan dan pertahanan strategis:

Dialog berlanjut membantu para peserta memahami kekhawatiran masing-masing serta menetapkan area kepentingan bersama. Dialog ini dapat dilakukan pada level politik antara kepala negara/pemerintah/kementerian

maupun level profesional atau spesialis sipil dan militer di lingkungan pemerintah serta angkatan bersenjata.

2. Perjanjian/MoU/perjanjian pertahanan:

Perjanjian ini dapat mencakup bantuan timbal balik hingga kerja sama yang lebih luas. Perjanjian semacam ini memastikan posisi masing-masing pihak terdokumentasi dengan baik untuk membangun kepercayaan dan menghindari salah paham di kemudian hari.

3. Transparansi kebijakan militer nasional:

Menjaga keterbukaan tertentu pada kebijakan pertahanan dan militer, seperti garis respons dan kemampuan, melalui berbagai media baik resmi/rahasia maupun terbuka seperti situs web, majalah, atau jurnal membantu memberikan penilaian yang realistis dan respons yang tepat. Walaupun niat damai bisa berubah, kemampuan biasanya tetap. Transparansi ini memungkinkan persepsi strategis dan pertahanan yang lebih baik, mengurangi ketegangan, serta menetapkan ukuran kekuatan, anggaran, dan biaya yang sesuai. Contoh yang sering dikutip adalah perbandingan hubungan India-Bhutan yang sangat dekat (Bhutan menjadi tuan rumah IMTRAT) dengan India-Bangladesh yang lebih kurang harmonis meski India pernah membantu kemerdekaan Bangladesh.

4. Mendukung pemerintahan yang sah:

Dukungan terhadap pemerintahan yang sah bisa dilakukan secara militer, seperti intervensi India pada kudeta Maladewa tahun 1988, maupun melalui pelatihan, nasihat, dan penyediaan peralatan militer.

5. Kontak personel profesional:

Kontak di semua tingkatan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik, mengurangi permusuhan, serta mempermudah pemecahan masalah dan interoperabilitas. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan formal, informal, hingga sosial antar-personel militer. Alumni lembaga pendidikan militer, khususnya dari kursus jangka panjang di sekolah komando atau sekolah tinggi staf nasional dimana para suami istri menjadi sarana penting untuk mencapai tujuan ini.

6. Pertukaran persepsi:

Untuk membangun kesamaan, saling menguntungkan, serta memahami perbedaan, dapat dilakukan pertukaran pandangan melalui inisiatif formal maupun informal (Jalur II). Partisipasi dalam kunjungan, seminar, konferensi, simposium, serta presentasi makalah pada acara-acara ini memberi wawasan penting bagi pengambil keputusan.

7. Partisipasi dalam Operasi Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPKO) atau misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan:

Komitmen formal terhadap PBB atau organisasi regional dalam penyediaan pasukan dan peralatan untuk misi perdamaian, bantuan kemanusiaan, atau operasi gabungan merupakan pilar penting diplomasi militer. Ini menunjukkan kesediaan sebuah negara untuk aktif di kancah internasional. India, misalnya, mendirikan *Centre for UN Peacekeeping* (CUNPK) di New Delhi, sementara AS menjalankan program *Global Peace Operation Initiative* (GPOI) dengan program seperti *Africa Contingency Operations*

Training and Assistance (ACOTA) dan *Enhanced International Peacekeeping Capabilities* (EPIC) untuk melatih negara kontributor pasukan. Prancis juga mendukung sekolah penjaga perdamaian Zambakro di Pantai Gading.

8. Memperkuat hubungan pertahanan untuk meningkatkan pengaruh dan akses sendiri:

Hubungan pertahanan yang sehat dapat memberi pengaruh dan akses terhadap negara target serta pembuat keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui penjualan, bantuan, atau hadiah peralatan; pembangunan infrastruktur militer; serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan bantuan dalam negeri. Ketergantungan pada peralatan atau pengetahuan melalui ekspor dan pertukaran personil juga memperkuat pengaruh ke negara target. Hal tersebut dapat memberikan akses ke lembaga dan pertahanan militer di negara target serta pengaruh pengambilan keputusan negara target.

9. Meningkatkan Kemampuan Pertahanan di lingkup material pertahanan:
 - Pengadaan dan pengembangan peralatan pertahanan: Pengadaan dan pengembangan peralatan pertahanan sangat penting agar militer memiliki daya tangkal yang memadai demi menjamin keamanan nasional. Melalui diplomasi militer, kerja sama dapat dilakukan untuk menyusun spesifikasi teknis, melakukan riset bersama, mentransfer teknologi, membeli peralatan, hingga produksi bersama. Contoh nyata adalah kolaborasi Indo-Rusia dalam rudal

jelajah BrahMos dan badan persenjataan empat negara *Organisation Conjoint de Cooperation en matiere d'ARmement* (OCCAR) yang melibatkan Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia untuk mengelola program peralatan pertahanan kolaboratif seperti jet tempur Eurofighter.

- Menjadikan industri pertahanan dan Litbang sendiri efektif dan layak secara finansial: Negara dengan militer besar dapat memproduksi peralatan dan suku cadang pertahanan sendiri agar lebih efisien secara ekonomi. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada impor saat konflik dan melindungi dari dampak sanksi atau harga yang terlalu tinggi. Cara mencapainya antara lain dengan promosi ekspor, transfer teknologi, penelitian dan pengembangan bersama, hingga produksi kolaboratif.
- Memanfaatkan pembelian alutsista dalam jumlah besar: Penjualan besar dari posisi yang kuat dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan strategis maupun ekonomi, misalnya melalui offset. Sebaliknya, pembelian dalam keadaan terdesak sering merugikan, seperti kasus India saat membeli kapal induk Rusia Gorshkov yang harganya melonjak dan pengirimannya tertunda.

10. Membantu negara sahabat untuk mengembangkan pertahanan (tanpa mengganggu keamanan negara sendiri):

Bantuan kepada negara sahabat dalam membangun kemampuan pertahanan meliputi peralatan, konsep, sumber daya manusia, hingga material tetap

harus memperhatikan keamanan pihak pemberi. Bantuan ini biasanya disertai perjanjian atau persyaratan tertentu agar tetap melindungi kepentingan pemberi bantuan.

11. Melakukan keterlibatan militer internasional untuk meningkatkan kemampuan militer sendiri:

Karena strategi perang dan manajemen pertahanan terus berkembang seiring teknologi, keterlibatan internasional penting untuk mengejar perkembangan ini. Hal ini bisa dilakukan melalui pertukaran personel, pelatihan keahlian dasar maupun lanjutan, pengadopsian praktik terbaik dari negara lain, serta pengembangan kemampuan doktrinal, konseptual, dan manajerial di bidang pertahanan.

12. Mempromosikan interoperabilitas pertahanan dan militer:

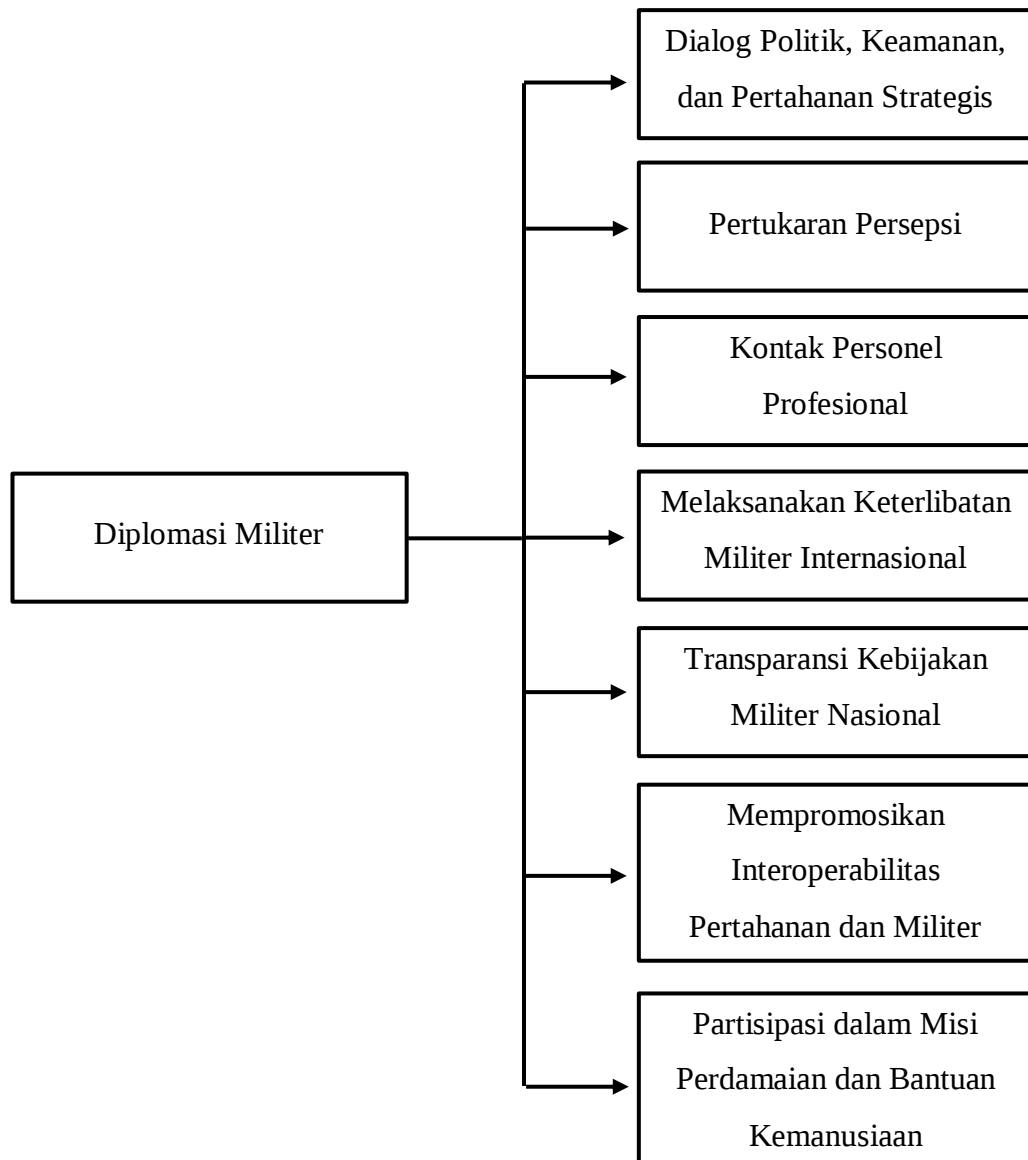
Kerja sama pertahanan sering menghasilkan operasi gabungan baik bilateral, multilateral (NATO), koalisi AS di Irak, atau di bawah PBB. NATO telah mengembangkan standar umum untuk bahasa, terminology militer, peralatan militer, dan prosedur demi interoperabilitas yang efektif, hal tersebut akan sangat berguna selama NATO ditempatkan di Kosovo dan daerah lainnya.

13. Penunjukan atase pertahanan ke luar negeri:

Penempatan atase pertahanan di luar negeri sudah lama menjadi praktik umum. AS dan Tiongkok memiliki jumlah atase terbanyak, hampir mencakup seluruh dunia. Sebaliknya, India cukup konservatif dengan tidak

menambah atase di luar negeri sehingga kehilangan banyak peluang diplomasi militer.

1.5. Sintesa Pemikiran



Bagan 1. 1 Sintesa Pemikiran

Berdasarkan bagan di atas, penulis ingin menjelaskan sintesa pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 merupakan kegiatan pelatihan bersama angkatan laut global yang diselenggarakan di Indonesia. Dalam pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025, terdapat beberapa hal strategis yang menunjukkan adanya implementasi diplomasi militer oleh TNI Angkatan Laut. Berdasarkan teori diplomasi militer oleh Muthanna, hal-hal strategis tersebut yaitu dialog politik, keamanan, dan pertahanan strategis; pertukaran persepsi; kontak personel profesional; melaksanakan keterlibatan militer internasional; partisipasi dalam misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan; transparansi kebijakan militer nasional; dan mempromosikan interoperabilitas pertahanan dan militer.

1.6. Argumen Utama

Dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 implementasi diplomasi militer oleh TNI Angkatan Laut dilakukan dengan beberapa hal yaitu pertama, dialog politik, keamanan, dan pertahanan strategis, terimplementasi dalam simposium, seminar, dan forum diskusi termasuk *International Maritime Security Symposium* (IMSS) ke-6 serta *bilateral meeting*. MNEK 2025 menjadi wadah diplomatik non-tempur untuk membangun saling pengertian dan merespons isu keamanan bersama. Kedua, pertukaran persepsi, terimplementasi melalui kegiatan seperti *International Maritime Security Symposium* (IMSS), *Learn From Expert* (LFE), dan *Subject Matters Expert Exchange* (SMEE). Negara-negara peserta berbagi pandangan tentang

ancaman maritim serta melakukan mekanisme kerja sama yang ideal. Ketiga, kontak personel profesional, terimplementasi melalui kegiatan seperti *Final Planning Conference* (FPC), *Learn From Expert* (LFE), *Subject Matter Exchange* (SMEE), dan *Tactical Floor Game* (TFG). Semua kegiatan tersebut dapat menciptakan kepercayaan dan mengurangi permusuhan. Keempat, melaksanakan keterlibatan militer internasional, terimplementasi melalui *International Fleet Review* (IFR), *Sea Phase Exercises*, dan *International Maritime Security Symposium* (IMSS). Hal-hal tersebut memberikan kesempatan saling belajar dan mengembangkan kapabilitas maritim nasional melalui observasi dan kolaborasi. Kelima, partisipasi dalam misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan, terimplementasi melalui *Medical Civic Action Program* (MEDCAP), *Engineering Civic Action Program* (ENCAP), dan *Search and Rescue* (SAR). Semua kegiatan tersebut mencerminkan komitmen kolektif untuk operasi non-tempur dan bantuan sipil. Keenam, transparansi kebijakan militer nasional, terimplementasi melalui penyampaian terbuka bahwa MNEK 2025 bersifat non-warfighting, akses publik terhadap dokumen seperti Buku Putih Pertahanan dan kebijakan pembangunan kekuatan serta fakta bahwa data umum alutsista tersedia dari sumber terbuka. Hal ini menciptakan kepercayaan dan menunjukkan niat damai. Ketujuh, mempromosikan interoperabilitas pertahanan dan militer, terimplementasi melalui kegiatan *Search and Rescue Exercise* (SAREX) dan *Sail Past* serta penggunaan referensi produk NATO yaitu *Standardization Agreements* (STANAG) yang telah diadopsi mayoritas peserta pada aspek komunikasi,

manuver laut, dan koordinasi. Negara peserta berlatih prosedur bersama untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan operasi multinasional.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif analitis. Definisi dari metode deskriptif analitis menurut Sugiyono (2009) adalah suatu metode yang berguna untuk menjelaskan atau memberi gambaran terhadap objek yang sedang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Gandis Sastia Dewi, 2019). Penulis menggunakan tipe penelitian ini untuk menggambarkan secara detail proses implementasi diplomasi militer yang dilakukan oleh TNI AL dalam pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan pemaparan yang terstruktur mengenai fakta, data, dan dinamika di lapangan, sementara analitis bertujuan untuk menjelaskan makna dan keterkaitan diplomasi militer dalam konteks hubungan internasional dan pertahanan.

1.7.2. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memberi batasan penelitian pada tahun 2025 karena Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang terakhir baru saja diadakan pada 15-22 Februari 2025 dengan tema “Maritime Partnership for Peace and Stability”. Penulis akan fokus menganalisis bagaimana

implementasi diplomasi militer TNI AL dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 selama kegiatan berlangsung.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada tulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Dikutip dari buku yang berjudul “Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya” yang ditulis oleh Iqbal Hasan, data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan cara wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya (Pahlephi, 2022). Penulis mengumpulkan data primer menggunakan metode wawancara dengan Kolonel Laut (P) Hastaria Dwi Prakoso, S.E., M.Sc. yang tergabung dalam divisi acara sebagai protokoler yang terlibat langsung dalam kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder, Menurut Sugiyono (2008) data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung, data ini diperoleh melalui perantara baik individu maupun dokumen (Sarjana, 2023). Penulis mengumpulkan data sekunder melalui jurnal, artikel, berita, dan literatur online yang kredibel sebagai pendukung data primer.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Maleong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami

dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas (Nanda, 2025). Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peran diplomasi militer TNI angkatan laut dalam Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025 untuk mewujudkan stabilitas keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik.

1.7.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang dibutuhkan dalam penelitian yang karena sangat penting untuk penulis agar tidak menyimpang dari batasan yang sudah ditentukan dan terorganisir demi berjalannya sebuah penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan yang terbagi menjadi 4 bab, sebagai berikut:

- 1. BAB I**, bab ini merupakan bab yang berisi awalan dalam mengerjakan suatu penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.
- 2. BAB II**, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai empat dari tujuh poin implementasi diplomasi militer TNI AL dalam MNEK 2025 yaitu dialog politik, keamanan, dan pertahanan strategis;

pertukaran persepsi; kontak personel profesional; dan melaksanakan keterlibatan militer internasional.

3. **BAB III**, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tiga poin lanjutan implementasi diplomasi militer TNI AL dalam MNEK 2025 yaitu partisipasi dalam misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan; transparansi kebijakan militer nasional; dan mempromosikan interoperabilitas pertahanan dan militer.
4. **BAB IV**, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penutup. Di dalam bab ini penulis akan memberi kesimpulan serta saran yang akan diberikan untuk karya tulis berdasarkan rumusan masalah yang dipakai penulis sebagai bahan evaluasi dan juga sebagai wawasan kedepannya untuk penelitian selanjutnya.